

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah politik Indonesia tidak pernah lepas dari peranan partai politik sebagai salah satu instrument utama demokrasi. Partai politik hadir bukan sekedar sebagai kendaraan elektoral, melainkan juga sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Dari sekian banyak partai politik yang pernah mewarnai dinamika politik Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi salah satu partai yang cukup berpengaruh. Kehadirannya tidak hanya menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan, tetapi juga membantu pembangunan identitas nasional dan sistem politik yang demokratis. Namun, seiring berjalannya waktu PNI mengalami kemunduran hingga akhirnya kehilangan relevansinya dalam peta politik nasional. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kegagalan partai sebagai entitas politik, tetapi juga menandakan perubahan yang lebih luas dalam struktur kekuasaan dan dinamika demokrasi di Indonesia.

Partai Nasional Indonesia pertama kali dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927¹ dan kemudian dibubarkan pada 25 April 1931 oleh kolonialisme Belanda karena dianggap mengancam keberadaan dari bangsa penjajah tersebut. Tujuan awal pendirian partai ini adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri serta melalui jalur politik non kooperatif terhadap kolonial Belanda.² Ideologi yang diusung partai tersebut ialah nasionalisme yang berpadu dengan sosialisme ala Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut sebagai '*marhaenisme*'.³ Ideologi ini menitikberatkan perhatiannya pada masyarakat kecil sehingga tidak heran dalam waktu singkat ia mampu menarik banyak simpati rakyat. Jumlahnya mencapai

¹ Nukman, "Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936", *Jurnal Sindang*, Vol. 3, No. 2, (Sumatra Selatan: Desember 2021), hlm. 42.

² Alfi Ramadhan dan Ahmad Izzuddin, "Partai Nasional Indonesia (PNI): Sejarah, Peran, dan Pengaruhnya di Indonesia", *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 3, (Sumatra Barat: Maret 2025), hlm. 6081.

³ *Ibid*, hlm. 6085.

2.787 orang pada akhir tahun 1928 dan memiliki cabang di berbagai daerah seperti Bandung, Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makasar, dan Manado.⁴

Pertumbuhan PNI yang begitu pesat menimbulkan kekhawatiran pada kubu pemerintah kolonial. Kekhawatiran itu mengharuskan mereka untuk menangkap dan mengadili Soekarno dan tujuh pimpinan PNI pada Desember 1929 karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibatnya, PNI pun dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Setelah pembubaran itu, muncul dua kelompok besar yang masing-masing membentuk partainya sendiri. Salah satu kelompok mendirikan Partai Rakyat Indonesia (Partindo) yang diketuai oleh Sartono dan yang lainnya membentuk PNI Baru yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta. Partindo lebih bersifat revolusioner, sementara PNI baru lebih menekankan pendidikan politik rakyat di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.⁵ Fragmentasi ini menjadi cikal bakal perpecahan politik nasional di Indonesia yang kelak mempengaruhi dinamika politik pasca kemerdekaan.

Setelah hampir 15 tahun kiprah PNI dalam dinamika perpolitikan Indonesia itu hilang, para tokoh politik Indonesia, seperti Mr. Sartono, Sarmidi Mangunsarkoro, dan Osa Maliki, serta beberapa orang lainnya berinisiatif untuk membentuk partai kecil yang bermarkas di Jakarta. Partai tersebut dinamakan sebagai Serikat Indonesia (Serindo). Dalam kongres pertama partai tersebut, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1946, para tokoh partai itu bersepakat untuk mengubah nama Serindo menjadi Partai Nasional Indonesia. Pemilihan nama tersebut dimaksudkan untuk meraih keuntungan politik dengan mengait-ngaitkan nama partai baru tersebut dengan PNI sebelum perang, yaitu partai yang didirikan oleh Soekarno. Selain pertimbangan keuntungan politik, komposisi pimpinan partai, falsafah, dan program partai tersebut nampak bahwa PNI 1946 berada dalam jalur langsung warisan faksional dan ideologi PNI 1927.⁶ Meskipun partai tersebut

⁴ *Ibid*, hlm. 6079.

⁵ Verelladevanka Adryamarthanino, "Partai Nasional Indonesia (PNI): Pendirian, Tokoh, dan Perkembangan", dalam *Kompas. Com*, 2 Mei 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/02/121649779/partai-nasional-indonesia-pni-pendiri-tokoh-dan-perkembangan?page=1>, diakses pada 9 September 2025.

⁶ Jose Eliseo Rocamora, *NSIONALISME MENCARI IDEOLOGI: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*. Penerj. Daniel Dhakidae, (Telik Naga: Penerbit GDN, 2021), hlm. 21-22.

mendapat keuntungan dengan penggunaan kembali nama PNI sebelum perang, sejak tahun 1946-1949 partai baru ini tetap mengalami berbagai tantangan yang justru mengancam eksistensinya. Memasuki era Demokrasi Liberal (1950-1959), barulah partai ini berjalan cukup stabil dengan basis dukungan terbanyak.

Selama era Demokrasi Liberal, PNI berjalan cukup baik dengan ideologinya *sosialisme-nasionalisme-demokrasi*.⁷ Perkembangan baik ini ditandai dengan peningkatan presentasi suara yang diperoleh pada Pemilu 1955. Dalam pemilihan tersebut PNI berhasil meraih 8.434.635 suara atau mendapat 22,3% dari jumlah keseluruhan suara yang diberikan, sementara Masyumi partai penyaingnya hanya memperoleh 20,9% suara. Hasil ini kemudian menjadikan PNI sebagai partai terbesar dengan basis dukungan luas di kalangan masyarakat Jawa.⁸

Meskipun demikian, kemenangan besar ini justru menjadi malapetaka bagi keberlangsungan PNI. Setelah peralihan dari era Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin (1959-1965), eksistensi partai tersebut mulai terancam. Di dalam tubuh PNI sendiri muncul faksi-faksi yang berseberangan antara sayap kiri dan sayap kanan. Faksi-faksi itu antara lain, faksi Sidik, faksi Wilopo, dan faksi PNI Partindo sebelum perang. Faksi Sidik dan faksi PNI Partindo sebelum perang mengambil posisi kiri yang cenderung dekat dengan Partai Komunis Indonesia, sementara faksi Wilopo mengambil posisi kanan yang dekat dengan faksi Natsir dalam Masyumi. Sayap kanan lebih moderat dan berupaya menjaga jarak dengan komunisme.⁹ Pertentangan internal ini melemahkan konsolidasi partai dan membuat PNI rentan terhadap perubahan konstelasi politik nasional.

Lebih lanjut, memasuki masa Demokrasi Terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno (1959-1965), peran PNI dalam aktivitas politik Indonesia semakin terpinggirkan. Soekarno selaku Presiden, yang saat itu tengah menguatkan kekuasaan pribadinya menerapkan sistem politik yang lebih otoriter. Demokrasi Terpimpin menekankan kepemimpinan tunggal presiden dan melemahkan peran partai politik sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan. Partai yang seharusnya

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

⁸ *Ibid*, hlm. 190.

⁹ *Ibid*, hlm. 61-62.

menjadi alat negara untuk memantau jalannya sistem pemerintahan justru dibekukan untuk melanggengkan kekuasaan tunggal. PNI yang semula diharapkan menjadi representasi kekuatan nasionalis untuk memerangi sistem pemerintahan yang cenderung otoriter, justru terjebak dalam konflik internal yang semakin tajam.

Pada kongres kesepuluh PNI yang berlangsung di Purworejo, Jawa Tengah, 28 Agustus - 1 September 1963, partai ini menetapkan marhaenisme sebagai ideologi resmi partai. Ideologi tersebut didefinisikan sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia.¹⁰ Definisi ini dipertegas dalam Deklarasi Marhaenis pada November 1964 yang menyatakan bahwa perjuangan harus dipimpin oleh petani dan buruh.¹¹ Namun, langkah ini justru memperdalam polarisasi antara faksi kiri yang pro Marxisme dengan faksi kanan yang lebih dekat dengan militer.

Dalam peristiwa G30S/PKI pada 1965, PNI kembali mengalami pengalaman pahit. Faksi kiri PNI yang semula lebih berpengaruh dalam partai tersebut justru dilemahkan oleh militer. Hal ini disebabkan oleh kedekatannya dengan PKI yang waktu itu dituduh menjadi biang dalam peristiwa G30S/PKI. Kepemimpinan Ali Sastroamidjojo digantikan oleh Osa Maliki yang mendapat dukungan tentara. Sejak saat itu, PNI tidak lagi menjadi kekuatan politik dominan untuk memerangi berbagai persoalan negara yang dianggap menyimpang atau menjadi alat kontrol pemerintah. Setelah peristiwa tragis ini, Presiden Soekarno justru dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Gugurnya Soekarno dari jabatannya menjadi tanda berakhirnya masa Orde Lama dan beralih menuju masa Orde Baru. Orde Baru sendiri sering diidentikkan dengan praktek kekuasaan yang lebih otoriter dan menutup diri terhadap berbagai kritik yang dilontarkan. Peralihan ini kemudian menjadi mimpi buruk bagi PNI karena eksistensinya sebagai partai politik justru hilang.

Pada Pemilu 1971, suara PNI merosot drastis hanya sekitar 6,9%, jauh di bawah Golkar dan NU. Kemerosotan ini bukanlah suatu proses yang biasa melainkan sebuah strategi politik dari pihak lain, termasuk para pemimpin dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 417-418.

¹¹ *Ibid*, hlm. 429.

partai Golkar, yang ingin menjatuhkan PNI.¹² Akhirnya, pada tahun 1973, rezim Orde Baru memaksa penggabungan partai-partai politik dalam skema penyederhanaan partai atau dipaksa untuk masuk dalam sistem tiga partai. Parmusi dan NU melebur menjadi satu partai, sementara PNI beserta partai-partai Kristen bergabung membentuk partai lainnya yang kemudian membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI),¹³ yang makin mempersempit ruang oposisi terhadap pemerintah.

Runtuhnya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada era Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru tidak hanya merupakan peristiwa politik biasa, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam struktur politik Indonesia dari masyarakat terbuka (*Open Society*) menuju masyarakat tertutup (*Closed Society*) seperti yang dikonsepkan oleh Karl R. Popper dalam *The Open Society and Its Enemies*. Perubahan ini berawal dari sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Soekarno pada tahun 1959-1965. Sistem pemerintahan yang demikian mengarah pada sistem politik yang lebih tertutup di mana Soekarno sebagai presiden cenderung otoriter. Selain penetapan sistem Demokrasi Terpimpin, peralihannya menuju Orde Baru semakin mempersempit ruang demokrasi. PNI yang sebelumnya menjadi kekuatan utama politik Indonesia dan menjadi alat kontrol pemerintah, gagal bertahan dalam transisi ini karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi.

Melalui perspektif Karl Popper, penulis akan menganalisis bagaimana pergeseran dari masyarakat terbuka ke masyarakat tertutup berperan dalam melemahkan dan akhirnya menghancurkan PNI. Bagi Karl Popper, masyarakat terbuka adalah masyarakat yang berbasis pada demokrasi dan kebebasan individu, memungkinkan perubahan sosial dan politik secara rasional dan bertahap, sistem yang memungkinkan adanya evaluasi kebijakan secara terbuka, dan tidak ada kebenaran mutlak dalam politik, serta semua gagasan bisa diuji dan dikoreksi.¹⁴ Sementara, masyarakat tertutup sebagaimana yang ia adopsi dari pemikiran Henry Bergson¹⁵ adalah masyarakat yang ditandai dengan ketaatan mutlak, dogmatisme

¹² *Ibid*, hlm. 505-506

¹³ *Ibid*, hlm. 505.

¹⁴ Karl Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penerj. Uzair Fauzah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 214.

¹⁵ Karlina Supeli, "Masyarakat Terbuka: Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep", *Jurnal Prisma*, Vol. 30, No. 1, (Depok: 2011), hlm. 4.

dan kontrol ketat atas politik dan kebebasan berpikir, tidak menerima kritik, sehingga kebijakan politik lebih bersifat mutlak, dipimpin oleh elite yang cenderung otoriter dengan keputusan yang tidak bisa dipertanyakan, dan perubahan sosial tidak terjadi secara alami, tetapi dipaksakan atau ditekan oleh kekuasaan.

Popper berpendapat bahwa masyarakat yang terbuka memungkinkan inovasi politik, sedangkan masyarakat tertutup menyebabkan stagnasi dan represi. Sistem Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru memperlihatkan gejala nyata masyarakat tertutup yang mana partai politik dilemahkan, kritik dibungkam, dan kekuasaan terkonsentrasi pada satu figur dominan.

Kajian tentang runtuhnya Partai Nasional Indonesia menjadi sebuah upaya penting karena tidak hanya menjadi bahan refleksi historis, tetapi juga sebagai pelajaran bagi demokrasi Indonesia masa kini. Setelah peralihan sistem pemerintahan dari Masa Orde Baru menuju reformasi, Indonesia kembali memberlakukan sistem multipartai dan kebebasan politik relatif yang lebih menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan di negeri ini. Namun, tantangan besar tetap ada. Adanya oligarki politik yang kuat, lemahnya kelembagaan partai, serta kecenderungan elitis yang membatasi partisipasi rakyat secara substantif. Tanpa pembelajaran dari masa lalu, terutama pengalaman pahit runtuhnya PNI, demokrasi Indonesia beresiko kembali terjebak dalam pola masyarakat tertutup.

Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi ganda. *Pertama*, memperkaya literatur historis mengenai dinamika partai politik Indonesia dengan menelaah secara khusus runtuhnya PNI dalam kerangka teori Karl Popper. *Kedua*, memberikan refleksi kritis bagi penguatan demokrasi Indonesia masa kini, dengan menekankan pentingnya menjaga prinsip masyarakat terbuka. Dalam menjalankan sistem pemerintahan sebuah negara yang demokratis kebebasan berpikir, kritik yang konstruktif, partisipasi rakyat, serta mekanisme *check and balance* mesti menjadi prinsip utama. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berkembang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substansial, demi mencegah terulangnya pola otoritarian yang pernah menjerumuskan bangsa ini dalam kehancuran.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah dipaparkan di atas dan sebagai bentuk perhatian pada keberlangsungan kehidupan partai politik di Indonesia agar tidak lagi mengalami pengalaman pahit sebagaimana yang pernah di alami PNI, maka penulis memilih judul, **“TRANSISI MASYARAKAT TERBUKA KE MASYARAKAT TERTUTUP: Studi Atas Runtuhnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam Perspektif Karl Popper dan Pembelajaran Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan satu masalah utama yang diangkat, yakni “Bagaimana konsep tentang Masyarakat Terbuka dan Masyarakat Tertutup menurut Karl Popper dapat menjelaskan tentang runtuhnya Partai Nasional Indonesia dalam transisi sistem pemerintahan dari era Demokrasi Terpimpin menuju Orde Baru?”. Selain masalah utama tersebut, adapun beberapa masalah turunan, antara lain sebagai berikut:

1. Apa itu PNI dan faktor-faktor internal serta eksternal apa saja yang menyebabkan kemundurannya?
2. Bagaimana konsep masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup menurut Karl Popper?
3. Bagaimana penerapan sistem Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru berkontribusi pada perubahan struktur politik yang membatasi ruang gerak partai politik, khususnya PNI?
4. Pelajaran apa yang bisa diambil dari runtuhnya PNI bagi penguatan demokrasi di Indonesia saat ini, khususnya dalam menjaga prinsip-prinsip masyarakat terbuka?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana filsafat di lembaga pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Sementara tujuan umumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami secara mendalam sejarah, peran, dan evolusi PNI dalam lanskap politik Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan menguraikan konsep masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup sebagaimana yang didefinisikan oleh Karl Popper.
3. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada kemunduran dan keruntuhan PNI selama periode Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru.
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru mempengaruhi dan mengubah struktur politik, khususnya dalam membatasi ruang gerak partai politik, dengan fokus pada PNI.
5. Untuk menerapkan konsep masyarakat terbuka dan tertutup dari Karl Popper dalam menjelaskan dan menganalisis runtuhnya PNI dalam konteks transisi sistem pemerintahan di Indonesia.
6. Untuk merumuskan dan menyajikan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari keruntuhan PNI guna memperkuat demokrasi di Indonesia saat ini, terutama dalam menjaga dan mempromosikan prinsip-prinsip masyarakat terbuka.

1.4 Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat dari penulisan karya ini:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik Indonesia pada masa lalu, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi generasi sekarang dan mendatang.
2. Memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip masyarakat terbuka dalam sistem demokrasi, seperti kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
3. Hasil analisis dalam tulisan ini juga dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
4. Melalui proses penulisan karya ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penulisan ilmiah.

5. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk memahami secara mendalam fenomena runtuhnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam perspektif teori masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup Karl Popper. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas sejarah dan dinamika politik di Indonesia yang melatarbelakangi peristiwa tersebut serta menginterpretasi makna yang terkandung dalam setiap sumber pustaka yang diperoleh.

Dalam metode tersebut, penulis menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis konten dan wacana. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema kunci terkait teori masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup serta faktor-faktor runtuhnya PNI yang muncul dalam berbagai sumber pustaka. Sementara analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana wacana tentang PNI dan sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru dibangun dalam berbagai literature. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian melalui buku-buku di perpustakaan, artikel jurnal ilmiah, berita, surat kabar, serta sumber-sumber daring lainnya.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer antara lain Karya Karl Popper "*The Open Society and Its Enemies*" yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan ke dalam Bahasa Indonesia dengan Judul "Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya." Selain itu, adapun sumber lain yang menjelaskan tentang PNI, yakni "Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965", karya Jose E. Rocamora.

Selain sumber primer, adapun beberapa sumber sekunder, yakni buku-buku, artikel jurnal ilmiah, surat kabar, berita, dan sumber daring lainnya lain yang

berbicara tentang sejarah PNI, sejarah politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan masa Orde Baru, dan teori Karl Popper tentang Masyarakat Terbuka dan Masyarakat Tertutup.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi tersebut disusun dalam lima (5) bab. Bab pertama (1) merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan tentang latar belakang masalah. Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang peran penting Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam sejarah perpolitikan Indonesia serta bagaimana kemunduran PNI mencerminkan perubahan dalam struktur kekuasaan dan dinamika demokrasi. Kemudian terdapat pula rumusan masalah yang diajukan untuk memfokuskan kajian pada pertanyaan-pertanyaan kunci terkait sejarah PNI, konsep Karl Popper tentang masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup, relevansi pemikiran Karl Popper dengan runtuhnya PNI, dan pelajaran berharga yang dapat dipetik bagi demokrasi Indonesia masa kini. Adapun dalam bagian pendahuluan memuat tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya, bab II akan berbicara tentang sejarah perkembangan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan faktor-faktor internal serta eksternal apa saja yang berkontribusi pada kemunduran partai tersebut. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan tentang bagaimana konsep Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru pada masa itu sehingga berkontribusi bagi runtuhnya PNI. Landasan historis ini penting agar memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan yang diajukan.

Pada Bab III, penulis akan menguraikan tentang Konsep Masyarakat Terbuka dan Masyarakat Tertutup menurut Karl Popper sebagai pisau analisis untuk melihat secara lebih jelas faktor-faktor penyebab runtuhnya Partai Nasional Indonesia.

Bab IV akan menyajikan hasil analisis. Di dalamnya memuat pembahasan yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Penulis akan menganalisis secara mendalam tentang sejarah dan perkembangan PNI, runtuhnya PNI dalam perspektif teori Karl Popper tentang masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup, serta implikasinya bagi demokrasi Indonesia saat ini. Pembahasan ini akan menjawab

rumusan masalah yang telah diajukan pada bagian pendahuluan dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diangkat.

Akhirnya, bab V, penulis menyajikan bagian penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama dari hasil analisis dan saran yang relevan bagi penguatan demokrasi Indonesia di masa mendatang. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah secara ringkas dan jelas, sementara saran akan memberikan rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis

Dengan sistematika ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literature historis mengenai dinamika partai politik di Indonesia, serta memberikan refleksi kritis bagi penguatan demokrasi Indonesia pada masa kini.